

# Pembangunan Berkelanjutan Dan Krisis Ekologi Sebuah Kritik Terhadap Pembangunan Wisata Super Premium Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Aristo Jadur \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Filsafat, Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

\*e-mail: [aristojadur514@gmail.com](mailto:aristojadur514@gmail.com)

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, melihat dan menguraikan fenomena pembangunan wisata superpremium di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat. Kedua, melihat dampak terhadap keutuhan ekologis dari pembangunan wisata superpremium tersebut. Ketiga, urgensi etika ekosentris terhadap manusia dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa, pembangunan wisata superpremium di Labuan Bajo tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga kerugian besar bagi masyarakat dan juga alam. Keutuhan ekologis terancam akibat pembangunan yang terus mengencar dan mengkonservasi alam secara besar-besaran. Perilaku ini disebut dengan antroposentris, di mana manusia dijadikan sebagai pusat segala-galanya dan alam sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhannya. Sebagai solusi alternatif dari permasalahan ini, penulis menganjurkan etika ekosentris. Etika ekosentris ini memandang bahwa, manusia dan alam itu sama-sama pusat dari segala-galanya. Dengan pendekatan etika ekosentris ini, manusia tidak hanya memandang alam sebagai bagian untuk pemenuhan kebutuhannya, melainkan juga sebagai bagian dari kehidupannya yang patut dijaga dan dilindungi.*

**Kata kunci:** pembangunan berkelanjutan, pembangunan wisata super premium, krisis ekologi, etika ekosentris.

## Abstract

*This research aims to; first, see and describe the phenomenon of superpremium tourism development in Labuan Bajo, West Manggarai district. Second, to see the impact on the ecological integrity of the superpremium tourism development. Third, the urgency of ecocentric ethics towards humans in determining development policies. In this paper, it is found that the development of superpremium tourism in Labuan Bajo not only brings benefits, but also great losses to the community and nature. Ecological integrity is threatened by development that continues to expand and conserve nature on a large scale. This behaviour is called anthropocentric, where humans are made the centre of everything and nature as an object to fulfil their needs. As an alternative solution to this problem, the author advocates ecocentric ethics. This ecocentric ethics views that humans and nature are both the centre of everything. With this ecocentric ethics approach, humans will not only see nature as an object to fulfil their needs, but also as part of their life that should be preserved and protected.*

**Keywords:** sustainable development, superpremium tourism development, ecological crisis, ecocentric ethics

## PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup adalah sebuah persoalan kolektif dan individu sekaligus. Mengapa demikian? Karena hampir setiap persoalan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan tindakan baik bersama maupun individu. Dewasa ini berbagai bentuk kerusakan lingkungan telah terjadi di mana-mana. Kerusakan ini terjadi bukan karena tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok semata-mata, melainkan juga oleh negara. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan seringkali menjadi sumber utama kerusakan lingkungan hidup. hal ini terjadi karena kurangnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya alam (Leha Silfiana, Samsuri, 2019: 129). Salah satu contoh yang diangkat penulis dalam artikel ini adalah kebijakan pembangunan berkelanjutan wisata super premium di Labuan Bajo. Cita-cita wisata super premium ini merupakan salah satu bentuk ambisi pemerintah untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai sebuah destinasi wisata super canggih. Namun, proses pembangunan wisata super premium ini telah menghadirkan wajah ganda. Di satu sisi, ia telah menjadikan Labuan Bajo

sebagai kota yang sangat maju, tetapi di sisi lain proyek ini mendatangkan kerugian bagi alam dan masyarakat kecil karena mereka menjadi semakin terpinggirkan.

Penulis mengkritik pembangunan ini dari sisi ekologis dengan menekankan kesenjangan antara kebutuhan manusia dan keutuhan ekologis. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan etika lingkungan hidup sebagai pisau analisis. Analisis ini menunjukkan bahwa adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo masih berada dalam pusaran paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme. Lemah dan kurang efektifnya peran pemerintah dalam menentukan pola pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan pembangunan banyak dikendalikan oleh kaum oligarki. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan akhirnya sekadar menjadi sebuah jargon politik. Sebenarnya, orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus berfokus pada upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Solusi atas konflik ini, hemat penulis adalah berusaha mengubah cara pandang manusia, khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan, untuk menanggalkan etika antroposentrismenya dan berusaha berpihak pada alam sebagai suatu komunitas ekologis yang patut dijaga bersama. Dengan mengedepankan etika ekosentrisme, sesungguhnya manusia sedang menjaga keutuhan alam ini. Jenis etika inilah yang harus dihidupi, sebab pada dasarnya manusia bukan hanya makhluk sosial; tetapi lebih dari itu, manusia adalah makhluk ekologis yang hidup bersatu dan menyatu dengan alam.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis isi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Warul Walidin, dkk bahwa penelitian kualitatif sesungguhnya adalah melihat fenomena atau realitas yang sesungguhnya tanpa batasan pandangan (2015; 2). Dalam tulisan ini, penulis membagikannya dalam beberapa bagian. Pertama, penulis akan menguraikan konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Kedua, penulis menguraikan secara singkat potret pembangunan wisata premium Labuan Bajo dan dampak yang dialami secara ekologis. Ketiga, penulis mengkritisi pembangunan berkelanjutan wisata super premium Labuan Bajo dari aspek ekologis dan memberikan solusi alternatif dari pembangunan yang bercorak antroposentris ke pembangunan yang bercorak ekosentris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Secara historis istilah pembangunan berkelanjutan ini sudah berkembang setelah terjadi deklarasi Stocklom pada tahun 1972. Pada saat yang sama ketika deklarasi Stockom ini dikeluarkan dibentuklah komisi lingkungan dunia yang disebut dengan world commission on environment and development (wced). WCED dalam laporannya tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu usaha di mana ada keterbatasan kemampuan lingkungan yang diciptakan oleh kemampuan teknologi dan organisasi sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. "Our Common Future" dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu "*sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet own needs*" (Mukhlis, 2010: 70).

Sedangkan definisi pembangunan berkelanjutan menurut PBB sebagaimana yang dikutip oleh Ferina Ardhi Cahyani (2020: 171) mengatakan *sustainable development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future*

*generations to meet own needs* ( pembangunan berkelanjutan didefinisikan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak dari generasi yang mendatang.

Setidaknya ada tiga pilar yang menjadi fokus keseimbangan dari paradigma pembangunan berkelanjutan itu sendiri, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari suatu masyarakat. Pada aspek sosial, pembangunan berkelanjutan dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sedangkan dalam pada aspek lingkungan pembangunan berkelanjutan diharapkan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Meskipun secara teoritis pembangunan berkelanjutan lebih memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologis, tetapi secara praktik seringkali pembangunan berkelanjutan merusak seluruh sistem kehidupan, terlebih khusus keutuhan ekologi. Hal ini dipengaruhi oleh tata kelola yang dijalankan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan aspek ekologi tetapi hanya lebih bercorak pragmatis.

### **Potret Pembangunan Wisata Super Premium di Labuan Bajo**

Terbit dan berlakunya Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018 menempatkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas atau dalam istilah lebih mentereng wisata super premium (Tandilino & Rero, 2022: 766). Ide tentang pembangunan wisata *premium* ini merupakan ide yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2019 lalu. Fokus utama dari pembangunan ini adalah peningkatan infrastruktur. Adapun beberapa tempat dan program yang menjadi lingkup utama pembangunan kawasan di Labuan Bajo antara lain penataan puncak Waringin, penataan kawasan kampung Baru, penataan tempat pelelangan ikan dengan kawasan wisata kuliner kampung Ujung, peningkatan trotoar dan jalan Soekarno-Hatta, pengembangan kawasan wisata Goa Batu Cermin, serta pengembangan sektor air minum dan sanitasi Labuan Bajo (Salukh, Pandie, dan Fanggal, 2023: 201).

Dalam konsep pembangunannya, desain pariwisata super premium lebih dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sangat bermutu seperti yang telah disebutkan di atas. *Pertama*, pembangunan Geopark. Ini merupakan bagian dari pengembangan wisata premium dengan anggaran mencapai 69,19 milyar rupiah. Geopark di Pulau Rinca rencananya akan dibuka untuk umum. Sementara itu, Pulau Komodo dan Pulau Padar dipakai sebagai kawasan eksklusif. *Kedua*, proyek Geothermal. Proyek geothermal Wae Sano rencananya akan dibuat untuk menyediakan listrik bagi wilayah Labuan Bajo (<https://www.indonesiabaik.id/infografis>, 2020).

Sejak tahun 2019 proses pembangunan besar-besaran di Labuan Bajo mulai dikerjakan. Pembangunan tahap pertama pada puncak Waringin telah selesai pada periode 2020. Pembangunan lanjutan terus dilakukan di salah satu daerah penyangga Labuan Bajo, yaitu Kampung Baru dengan pekerjaan pembangunan ruang terbuka publik, toilet wisata, dermaga nelayan, dan Jalan Gertak Bukit Pramuka seluas 60 meter persegi (<https://www.antaranews.com>, 2019). Rampungnya sebagian besar pembangunan diharapkan akan memberikan kenikmatan tersendiri bagi para pengunjung di Labuan Bajo dengan adanya fasilitas yang memadai. Secara keseluruhan proses penataan kawasan yang menjadi fokus utama dari wisata *premium* ini hampir selesai pada tahun 2022.

Secara teoritis, tujuan pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengembangkan potensi kepariwisataan. Masyarakat setempat mesti mendapat keuntungan dari perkembangan pariwisata di wilayahnya. Selain itu, salah satu poin yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah adanya ruang yang peka terhadap situasi lingkungan hidup dan budaya setempat (Sedarmayanti & Sastrayuda, 2018: 142). Pembangunan berkelanjutan mesti menganut prinsip kestabilan iklim ekologi yang bersifat jangka panjang. Dalam kerangka berpikir ini, bagaimanakah

kita melihat pembangunan wisata premium Labuan Bajo? Apakah wisata super premium tersebut mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat atau hanya menguntungkan para oligarki? Apakah pembangunan tersebut seutuhnya ramah lingkungan atau justru sebaliknya?

### **Pariwisata *Premium* Labuan Bajo : Siapa yang Untung?**

Wacana pembangunan wisata super premium yang menelan biaya 1,30 triliun rupiah ini telah memicu banyak problem. Dalam konsep pembangunannya, desain pariwisata super premium memang dilakukan dengan dalih keberlanjutan konservasi alam Labuan Bajo sebagai sasaran pembangunan. Sayangnya, praktik pembangunan tersebut justru meminggirkan prinsip konservasi. Tak hanya itu, gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang membuat masyarakat semakin terdesak ke pinggir. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status pariwisata di Labuan Bajo menjadi pariwisata super premium telah meminggirkan masyarakat asli Labuan Bajo. Di sana terjadi kesenjangan antara hak kepemilikan rakyat dan otoritas pemerintah. Pemerintah, dengan menggunakan hak otoritasnya secara gamblang menggusur pemukiman rakyat tanpa ada pertimbangan moral.

Selain itu, jurang kesenjangan kepemilikan agraria pun semakin lebar. Mereka yang bermodal akan dengan mudah merogoh kocek dan ujung-ujungnya akan menjadi pemilik beberapa lokasi strategis. Sementara itu, masyarakat lokal yang tergolong masyarakat tak bermodal mustahil akan dapat menjadi pemilik daerah strategis sebab secara finansial mereka kalah bersaing.

Salah satu pertanyaan yang perlu dilontarkan di balik pembangunan ini adalah siapa yang mendapat keuntungan? Masyarakat setempat atau justru para investor? Rasanya hanya propaganda semata bila dikatakan bahwa tujuan pembangunan wisata super premium ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nyatanya, begitu banyak masyarakat yang menolak keras pembangunan di Labuan Bajo (Da Costa, 2024: 2). Penolakan mereka ini sebetulnya bukan tanpa alasan. Mereka menolak karena merasa bahwa pembangunan wisata super premium akan berefek serius terhadap eksistensi mereka. Maka, jelas bahwa pembangunan tersebut bukan mensejahterakan masyarakat. Ia hanya akan mempertebal pundi-pundi keuangan investor atau oligarki sekaligus membawa malapetaka bagi masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat lokal tidak bisa bersaing dalam industri pariwisata super *premium* Labuan Bajo.

*Pertama*, konsep pariwisata yang dikembangkan tidak disertai oleh penguatan sumber daya masyarakat lokal. *Kedua*, dari perspektif tata kelola ekonomi, konsep pengembangan pariwisata superpremium tersebut sungguh kapitalistik-neoliberal. *Ketiga*, secara sosial politik, masalah ketidakadilan dalam pengembangan pariwisata super premium Labuan Bajo dipicu oleh kebiasaan penguasa yang lebih memihak pemilik modal daripada masyarakat lokal. *Keempat*, secara budaya terjadinya destruksi di bidang pariwisata adalah masih terdapat rasa inferioritas terhadap kebudayaan sendiri dan kurang memberikan penghargaan terhadap tradisi dan kebudayaan sendiri tersebut (Denar & Tolo, 2022: 39-40).

Sadar atau tidak, sejak didesain sebagai destinasi wisata super premium, distribusi masyarakat pengusaha kelas menengah ke bawah di Labuan Bajo justru menurun. Alasannya adalah karena kehadiran para investor telah mendominasi perekonomian di Labuan Bajo. Dengan alasan itu, dalam bingkai pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo, tak heran jika banyak orang sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi sebenarnya merupakan presiden yang pro investor (Bagung, 2022).

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konsep pembangunan ini hanya bercorak utilitarian. Salah satu orientasi terbesar yang dianut oleh pemerintah dalam pembangunan wisata

premium Labuan Bajo adalah prinsip kemanfaatan. Manfaat dan keuntungan yang besar menjadi alasan kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang besar di Labuan Bajo. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menjadi penikmat dari keuntungan pembangunan ini. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kue pembangunan ini hanya dinikmati oleh para pemilik modal semata.

Hal yang juga amat krusial dari etika atau prinsip utilitarian adalah hilangnya kesadaran moral manusia terhadap keberadaan yang lain, termasuk entitas non-manusia. Segala sesuatu bisa dikorbankan demi kenikmatan banyak orang. Hal ini tentunya merugikan dimensi yang lain, termasuk dimensi ekologis. Sadar atau tidak, pembangunan wisata premium Labuan Bajo telah mengorbankan alam hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dengan demikian, politik pembangunan wisata premium Labuan Bajo sangat bercorak utilitarian karena hanya mengejar kepentingan yang bersifat sementara dengan mengorbankan alam yang merupakan sumber kehidupan.

### **Pembangunan Wisata Super-Premium dan Krisis Ekologi**

Perilaku manusia yang bercorak antroposentris telah menjadikan alam sebagai tujuan utama dalam memenuhi hasrat dan keinginannya. Manusia menjadikan dirinya sebagai pusat segala-galanya, sehingga ia merasa boleh melakukan apa saja. Cara pandang inilah yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif, yakni sikap yang tidak peduli sama sekali terhadap alam dan segala isinya karena alam dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri (Keraf, 2010: 3). Dalam pandangan penulis, hal inilah yang diperlihatkan dalam proses pembangunan wisata super premium di Labuan Bajo.

Salah satu persoalan paling penting dari pembangunan wisata super premium di Labuan Bajo ini adalah persoalan ekologi. Ekologi menjadi pilar utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan, dan karena itu krisis ekologi menjadi masalah penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Widodo, 2021: 321). Akibat dari ditetapkannya Labuan Bajo sebagai wisata super premium, pembangunan Pulau Komodo dan Pulau Rinca dilakukan secara serampangan dan menyebabkan menyebabkan krisis lingkungan. Sadar atau tidak, pembangunan wisata super premium ini telah memberi dampak negatif bagi lingkungan hidup, khususnya di Labuan Bajo. Eksploitasi alam yang besar-besaran telah membuat kehidupan warga terancam. Masyarakat akan kekurangan air bersih, udara semakin tidak kondusif, dan potensi banjir menjadi sangat besar.

Patutlah dicatat bahwa *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) telah memberikan awasan tentang efek dari rencana pembangunan proyek pariwisata Indonesia yang berjudul 'Jurassic Park' di Taman Nasional Komodo Indonesia itu. UNESCO memberikan peringatan tersebut karena dampak negatif dari proyek tersebut terhadap lingkungan di salah satu situs warisan dunia tersebut (Putri, 2021). Namun, pemerintah memberikan klaim bahwa pembangunan tetap mementingkan aspek ekologi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, berdasarkan teori ekologi lanskap, perubahan struktur dalam pembangunan sesungguhnya berdampak pada seluruh sistem di dalamnya. Dampak terbesarnya adalah bahwa ruang gerak satwa nanti akan berkurang. Dampak lingkungan yang mungkin juga akan timbul adalah resiko gangguan air tanah serta gangguan kehidupan bawah laut akibat pencemaran (Syahadat1 & Putra, 2021: 1). Meskipun sesungguhnya kelangkaan air memang sudah sering terjadi sejak dahulu, tetapi eksploitasi yang berlebihan akan semakin menurunkan kualitas lingkungan.

Selain itu, habitat komodo pun akan terancam. Pembangunan wisata super premium yang tanpa batas telah mengancam eksistensi satwa liar yang ada di kawasan komodo, termasuk komodo itu sendiri. Sangat disayangkan ketika melihat reaksi dari komodo yang sempat viral di media sosial, yang menghalangi sebuah truk ketika hendak membawa material di jalur yang biasanya menjadi tempat komodo bermain. Apa yang mesti dipelajari dari tindakan komodo

ini? Apakah kejadian ini hanya ditanggapi sebagai suatu hal yang biasa? Kejadian ini sebenarnya menuntut keteguhan hati dan kesadaran jiwa dari para penguasa, yakni bahwa kejadian ini mesti dilihat sebagai bentuk protes dari komodo atas pembangunan yang mengancam eksistensi mereka. Namun, hal ini seolah-olah tidak mempengaruhi pemerintah yang terus mengeksploitasi alam yang menjadi habitat dari komodo-komodo tersebut. Maka, tidaklah salah bila dikatakan bahwa pembangunan wisata super premium di Labuan Bajo ini adalah salah satu tragedi yang saat ini sedang menghantui keutuhan ekologi, dimana telah terjadi ancaman kepunahan spesies, kerusakan hutan, kehilangan tanah yang subur, dan polusi udara dan air yang semakin buruk (Berry, 2013: 122).

### **Pembangunan Berkelanjutan dan Etika Ekosentrisme : Sebuah Solusi Alternatif**

Kondisi alam akibat pembangunan yang terus-menerus dilakukan di Labuan Bajo semakin tidak menentu. Tidak bisa dimungkiri bahwa ini semua adalah akibat dari keangkuhan pemerintah yang terlalu berkiblat antroposentris. Pembangunan yang dijalankan telah mereduksi alam dan menjadikannya korban dari proses pembangunan tersebut. Hal ini telah mengingkari arti dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan yang sebenarnya bersifat holistik kini beralih menjadi pembangunan yang otoriter, di mana segala kepentingan masyarakat adat, sosial, budaya dan ekologi dikorbankan demi suatu ambisi yang katanya sangat menguntungkan.

Lantas, upaya apa yang mesti dilakukan ketika berhadapan dengan situasi ini? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sikap penulis sangat jelas yaitu, berpijak kepada alam dengan mengacu pada etika ekosentrisme. Ini adalah solusi alternatif yang ditawarkan untuk meredakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan wisata premium di Labuan Bajo. Tidak ada cara lain selain mengubah cara berpikir yang bersifat antroposentris ke ekosentris, dari otoriter dan berat sebelah menuju ke yang holistik. Mengutip apa yang dikatakan oleh Paul Shrivaszava (1995: 132):

*Ecosentric managers reject uncontrolled organizationa us of input in the form of natural resources and energy. They subscribe to the principle of sustainable use of natural resources. sustainable use means pacing the exploitation of renewable resources in such a way that they can regenerate themselves through natural proceses. It also involves minimizing the use of nonrenewable resources. The basic for this principle is recognition that the earth's resources are finite.* (Para pemikir ekosentris menolak penggunaan input yang tidak terkendali, dalam bentuk sumber daya alam dan energi. Mereka mengadut prinsip penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penggunaan yang berkelanjutan berarti membatasi eksploitasi sumber daya terbarukan sedemikian rupa sehingga sumber daya tersebut dapat bergenerasi sendiri melalui proses-proses yang berkelanjutan. Hal ini juga melibatkan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Dasar dari prinsip ini adalah pengakuan bahwa sumber daya bumi terbatas).

Pandangan di atas sejatinya menegaskan bahwa pada dasarnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu memiliki batasannya. Mesti ada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan ekosistem alam. Etika ekosentrisme menentang sikap manusia yang bersifat antroposentrisme ini.

Ekosentrisme adalah sebuah pandangan etis yang memusatkan kehidupan pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tak hidup (Keraf, 2010: 92-93). Sebagai satu kesatuan, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi manusia semata, tetapi juga berlaku bagi semua realitas ekologis termasuk entitas non-manusia, seperti alam maupun hewan. Dalam paham ekosentrisme, setiap makhluk memiliki tujuan dalam dirinya sendiri dan berkontribusi membentuk ekosistem di bumi ini.

Berhubungan dengan itu, pembangunan mestinya berpijak pada prinsip ekosentris ini. Dalam kacamata ekosentrisme, pembangunan berkelanjutan meski memperhatikan aspek ekologis, baik manusia maupun non-manusia. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada

keuntungan ekonomi semata dengan mengorbankan alam sebagai konsekuensinya. Pembangunan mestinya berjalan selaras antara hak manusia dan alam atau non-manusia. Dalam konsep pembangunan, pemangku kebijakan mesti memprioritaskan kelestarian bentuk-bentuk kehidupan di planet ini demi mencapai keberlanjutan ekologis (Keraf, 2010: 125). Bagaimana langkah konkrit yang mesti dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keutuhan ekologis sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap paradigma antroposentris. Dalam paradigma ekosentris manusia dan alam adalah satu-kesatuan. Dalam konteks pembangunan ini mesti ada rasa timbal balik. Contohnya ketika menggusur pohon untuk membuka jalan atau lahan baru, mesti ditanamkan kembali sebagai gantinya. Selain sebagai tanggung jawab etis, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk agar kelestarian alam itu tetap terjaga.

Dalam konteks pembangunan wisata premium Labuan Bajo pun diharapkan demikian. Dibutuhkan suatu perubahan yang fundamental dan revolusioner terhadap cara pandang dan nilai terhadap manusia dan terhadap alam yang menjadi bagian utuh dari hidupnya. Pemerintah mesti merubah cara pandang dari yang berpusat pada diri sendiri menuju kepada yang ekologis atau menyeluruh.

Dalam hal ini, keberlanjutan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Sedangkan keberlanjutan lingkungan hidup sendiri hanya akan terwujud melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (eco-development). Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dengan demikian, sumber daya yang ada saat ini dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang saja, tetapi jauh ke depan untuk generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip keadilan antar dan intergenerasi (Mukhlis, 2010: 72).

Ada beberapa hal yang hemat penulis mesti diperhatikan oleh pemerintah ketika hendak mengambil suatu kebijakan, khususnya kebijakan pembangunan. *Pertama*, melakukan kajian khusus terhadap dampak dari pembangunan tersebut. Kajian ini meliputi berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial dan juga lingkungan. *Kedua*, pembangunan harus lebih berpijak pada keutuhan lingkungan yang berkelanjutan. *Ketiga*, melakukan diskusi dengan para aktivis lingkungan dan masyarakat yang akan terdampak sebelum mengambil kebijakan.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan wisata super premium di Labuan Bajo telah melahirkan problem yang cukup serius bagi keutuhan ekologis. Pembangunan yang besar-besaran telah menjadikan alam sebagai korban tanpa ada pertimbangan moral. Pandangan yang menjadikan manusia sebagai pusat segala-galanya telah menjadikan manusia pribadi yang egoistik. Hemat penulis, cara berpikir yang bercorak antroposentris inilah yang membuat keutuhan ekologis terancam. Sebagai solusi alternatifnya, penulis menganjurkan agar pemerintah mengubah etika atau cara pandangnya dari yang bersifat antroposentris menuju etika ekosentris. Etika ekosentris memandang manusia dan entitas non-manusia sebagai satu kesatuan yang mesti dijaga bersama demi keutuhan planet bumi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardhi Cahyani, Ferina. (2020). "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Indonesian State Law Review*, 2 (2), 171.

DOI: <https://doi.org/10.62017/merdeka>

- Bagung, Aprianus Defal Deriano. (2022). "Potret Buram Pembangunan Pariwisata Premium di Labuan Bajo", <https://thecolumnist.id/artikel/potret-buram-pembangunan-pariwisata-super-premium-di-labuan-bajo-2190>. Diakses pada 03 November 2024.
- Bandaso Tandilino, Sari dan Sandro Rero, Laurensius. (2022). "Model Application Thematic Tourism Village Based On Cleaning, Healthy, Safety And Environment In Supporting Super Premium Tourism Destination Labuan Bajo, East Nusa Tenggara". *Jurnal Atlantis Press*, 2 (2), 766.
- Berry, Thomas (2003). *Kosmologi Kristen*. Maumere: Ledalero.
- Da Costa, William. (2024). "Social Carrying Capacity Kawasan Pariwisata Super Premium Marina Labuan Bajo". *Journal of Tourism and Hospitality Analysis*, 1 (1), 2.
- Denar, Benediktus dan Tolo, Paulus. (2022). "Teologi Publik Dan Praksis Pengembangannya Dalam Pastoral Pariwisata di Keuskupan Ruteng", *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 11 (2), 39-40.
- Keraf, Sonny A. (2010). *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keraf, Sonny A (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- <https://www.antaraneews.com/berita/950979,pemerintah-lanjutan-pembangunan-infrastruktur-labuan-bajo>. Diakses pada, 03 November 2024.
- <https://indonesiabaik.id/infografis>, Destinasi wisata premium Labuan Bajo. Diakses pada 03 November 2024.
- Mukhlis. "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*, 7: 2, (2010): 70.
- Putri, Budiarti Utami. (2021). "UNESCO Minta Indonesia Hentikan Sementara Proyek di Taman Nasional Komodo". *Tempo*.
- Sedarmayanti, Sastrayuda, Gumelar S, Afrisa, Lia. (2018). *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Refika.
- Shiravastava, Paul. (1995). "Ecocentric Management For A Risk Society", *Journal Academy Of Management Riview*, 20 ( 1), 132.
- Samsuri, Leha Silfiana. (2019). 'Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Studi Pemuda Volume*, 8 ( 2), 129.
- Syahadat1, Ray March, Syah Putra, Rizal Ichsan. (2021). "Dampak Positif dan Negatif Pembangunan di Komodo dan Sekitarnya: Sebuah Tinjauan Literatur". *Envoist Journal* , 2 ( 2), 1.
- Yunita Salukh, Jelianti, Pandie, David B.W. dan Fanggidae, Apriana H.J. (2023). "Analisis Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Berkelanjutan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (7), 201.
- Widodo, Ageng. (2021). "Potret Ekologi Pembangunan dan Krisis Ekologi di Indonesia." *Jurnal Prosiding Mukhtamar Pemikiran Dosen Pmii*, 1 (1), 321.
- Walidin, Warul, Saifullah. (2015). *Tabrani, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh; FTK Ar-Raniry, Press.